



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)**

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TAHUN 2005-2025

BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Selatan

@e-mail : bappedabengkuluselatan@yahoo.com



PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

(RPJPD)

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TAHUN 2005-2025



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
- b. bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu Tahun 2004-2024;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Dan

BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2005-2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Kantor, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

10. Pembangunan daerah adalah bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Arah Kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai visi dan misi.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dicapai.
2. RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

1. RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
 - BAB IV : Visi dan Misi Daerah
 - BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
 - BAB VI : Kaidah Pelaksanaan
2. Uraian secara rinci RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4

1. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada Tanggal : 17 Desember 2011


BUPATI BENGKULU SELATAN,

H. RESKANE AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
Pada Tanggal 17 Desember 2011


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

H. ZAINAL ABIDIN MERAHLI

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

(RPJPD)

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TAHUN 2005-2025

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
	1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	5
	1.4. Sistematika Penulisan	6
	1.5. Maksud dan Tujuan	7
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	9
	2.1. Aspek Geografi dan Demografi	9
	2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	9
	2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	12
	2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	21
	2.1.4. Demografi	21
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	21
	2.3. Aspek Pelayanan Umum	27
	2.4. Aspek Daya Saing Daerah	31
BAB III	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	37
	3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	38
	3.2. Isu Strategis	45
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH	48
	4.1. Visi	48
	4.2. Misi	50
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	56
	5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang untuk Masing-masing Misi	56
	5.2. Tahapan dan Prioritas	65
BAB VI	KAIDAH PELAKSANAAN	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen	6
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Bengkulu Selatan	10
Gambar 2.2	Jumlah Produksi Padi Sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan.....	13
Gambar 2.3	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkulu Selatan.....	24
Gambar 2.4	Angka Kriminalitas yang tertangani	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan	9
Tabel 2.2	Luas dan Persentase Hutan menurut Fungsinya	12
Tabel 2.3	Luas Lahan Sawah Per Kecamatan	13
Tabel 2.4	Luas Tanaman Perkebunan Rakyat	14
Tabel 2.5	Potensi Bahan Galian Pertambangan di Kabupaten Bengkulu Selatan	15
Tabel 2.6	Jumlah Usaha Industri menurut Jenis Industri dan Kecamatan	16
Tabel 2.7	Produksi Perikanan Darat Per Kecamatan	17
Tabel 2.8	Populasi Ternak Menurut Jenis Per Kecamatan	17
Tabel 2.9	Suku di Kabupaten Bengkulu Selatan	18
Tabel 2.10	Kekayaan Budaya (Tari-Tarian dan Adat Istiadat) Di Kabupaten Bengkulu Selatan	19
Tabel 2.11	Agama di Kabupaten Bengkulu Selatan	19
Tabel 2.12	Potensi Wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan	20
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Per Kecamatan	21
Tabel 2.14	PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2009	22
Tabel 2.15	PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2009	23
Tabel 2.16	Sumbangan Sektor Kegiatan Ekonomi terhadap PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkulu Selatan	25
Tabel 2.17	Data Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan	26
Tabel 2.18	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	26
Tabel 2.19	Rasio Penduduk yang Bekerja	26
Tabel 2.20	Persentase Balita Gizi Buruk	27
Tabel 2.21	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	27
Tabel 2.22	Data Fokus Pendidikan	28
Tabel 2.23	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	29
Tabel 2.24	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Pelayanan	29
Tabel 2.25	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	30
Tabel 2.26	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)....	30
Tabel 2.27	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Lainnya.....	30
Tabel 2.28	Cakupan Kunjungan Bayi	31
Tabel 2.29	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	31
Tabel 2.30	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Berkompetensi Kebidanan	31
Tabel 2.31	Matrik Indikator Kunci Utama	33
Tabel 5.1	Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	57

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan, baik tujuan pembangunan daerah maupun nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pembangunan di daerah semakin menggeliat semenjak bergulirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang mengawali lahirnya wacana otonomi daerah.

Otonomi daerah membawa perubahan yang signifikan yaitu adanya pergeseran paradigma dari sentralistik ke desentralistik, dari *top down* ke *bottom up*, dari keseragaman menjadi keberagaman, dari budaya petunjuk menjadi budaya prakarsa dan memberi kewenangan yang besar kepada daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di daerah, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dijamin dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Seiring dengan berkembangnya dinamisasi pembangunan di daerah, Undang-undang tersebut disempurnakan menjadi dan diikuti Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) yang selalu mengedepankan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektif, penegakan supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal demikian penting sebagai bentuk percepatan pembangunan sehingga manfaat yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembangunan di daerah dapat menyentuh segala aspek yang berkenaan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan di daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aktivitas yang multidimensional serta memerlukan kurun waktu yang harus berkesinambungan. Dalam rangka akselerasi pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan diawali dengan disusunnya dokumen perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, kemudian diikuti penganggaran yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi, dan diterjemahkan dalam pelaksanaan pembangunan mengedepankan profesionalitas dengan diiringi pengawasan dan pengendalian.

Perencanaan pembangunan daerah harus tetap memperhatikan dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan baik itu di tingkat pusat maupun daerah lainnya. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan), dan perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan yang disusun harus dapat mengakomodir kepentingan semua elemen masyarakat sehingga akan tercapai tujuan yang diinginkan, yaitu pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*).

Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang bersifat makro serta memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJPD mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembangunan, kesejahteraan yang semakin tinggi dan semakin adil senantiasa dicita-citakan oleh semua pihak. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa setiap pengelola pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada dasarnya selalu menetapkan hal tersebut sebagai tujuan akhir yang ingin diwujudkan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 serta Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010 bahwa RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun mendatang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan tersebut serta sebagai upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah lainnya, maka disusun RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode tahun 2005-2025.

RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang akan dicapai.

Proses penyusunan RPJPD terdiri dari 5 (lima) tahap utama yaitu : tahap pertama : persiapan penyusunan RPJPD yang meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai RPJPD, penyusunan agenda kerja tim RPJPD serta pengumpulan data dan informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan awal RPJPD yang dilakukan melalui dua tahapan yaitu perumusan rancangan awal dan penyajian rancangan awal RPJPD yang didalamnya dilakukan analisis terhadap RTRW, penelaahan terhadap RPJPN, analisis gambaran kondisi daerah, isu strategis daerah, perumusan visi dan misi serta perumusan arah kebijakan. Selain itu juga dilakukan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh atau wakil berbagai elemen masyarakat, pakar, akademisi, dan para pemangku kepentingan terhadap draft rancangan awal RPJPD. Tahap ketiga : Pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Tahap keempat : Penyusunan rancangan akhir RPJPD meliputi : konsultasi rancangan akhir ke Gubernur Bengkulu, penyempurnaan rancangan akhir RPJPD dan melengkapi sistematika rancangan awal RPJPD menjadi rancangan akhir. Tahap kelima: penetapan Perda RPJPD.

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki berbagai potensi yang harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Disisi lain, Kabupaten Bengkulu Selatan juga memiliki keragaman budaya, keragaman suku serta keragaman agama yang menjadi ciri kekayaan tersendiri yang sangat potensial untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi daerah. Keragaman, walaupun merupakan tantangan, namun menjadi bagian dari modal dalam mendorong proses dan membangun pilar-pilar kemajuan yang semakin saling mengisi (*komplementatif*) dan saling memperkuat yang memberikan sinergi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 yang pada gilirannya menambah kemampuan bersaing

dan kemampuan berkolaborasi sesuai dengan potensi terbaik daerah. Dengan demikian, dalam jangka panjang diharapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai dan dapat menjamin berjalannya pembangunan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu Tahun 2004-2024;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu;

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

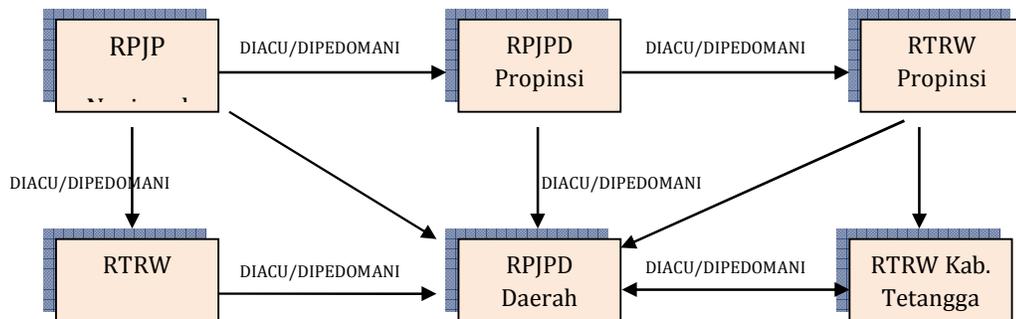
Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025 merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal ini sebagai upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan di daerah dengan pembangunan nasional.

RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dimana keterkaitan tersebut sebagai berikut:

1. RPJP Nasional tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Dokumen-dokumen tersebut berisikan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dan menengah untuk seluruh Indonesia. Sementara itu, RPJP Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 merupakan dokumen yang berisikan perencanaan pembangunan di Propinsi Bengkulu;
2. RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam rangka mendukung terciptanya pembangunan berkesinambungan. Di samping itu RPJPD disusun untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi guna memudahkan tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam jangka panjang.
3. Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025 mengacu dan mempedomani dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik itu RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri maupun RTRW Kabupaten tetangga khususnya kesepakatan bersama dengan kabupaten tetangga, dengan harapan tercipta sinkronisasi dalam pembangunan dan pengembangan yang berbasis tata ruang wilayah.

Untuk memberikan gambaran secara lebih spesifik, dapat dijabarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen



1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RPJPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan RPJPD serta maksud dan tujuan penyusunan RPJPD.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi daerah dilihat dari aspek geografi dan demografi Kabupaten Bengkulu Selatan serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III. Analisis Isu-Isu Strategis Daerah

Penyajian isu-isu strategis daerah meliputi permasalahan-permasalahan daerah dan isu-isu strategis daerah. Permasalahan-permasalahan daerah yang disajikan adalah permasalahan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis daerah dapat berasal dari permasalahan-permasalahan daerah maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

BAB IV. Visi dan Misi Daerah

Bab ini berisi tentang visi dan misi Kabupaten Bengkulu Selatan ingin dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahunan. Bab ini juga menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran dari misi yang telah ditetapkan dan disepakati bersama tersebut.

Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dalam bagian ini diuraikan mengenai sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi serta tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah.

BAB VI. Kaidah Pelaksanaan

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan yang menjelaskan bahwa seluruh *stake holder* pembangunan berkewajiban untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan pencapaian visi, misi, tujuan dan arah kebijakan Kabupaten Bengkulu Selatan. RPJPD juga merupakan pedoman bagi setiap kepala daerah untuk menyusun RPJMD sebagai bentuk perencanaan pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahunan

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan

dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaksana pembangunan daerah (Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah dan daerah;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya Kabupaten Bengkulu Selatan yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (*sustainable*);
5. Tercapainya pembangunan jangka panjang berdasarkan kesinambungan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Tercapainya pemerataan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU Darurat No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum pemekaran adalah seluas 5.949,14 km². Namun berdasarkan UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan sehingga setelah pemekaran luas wilayahnya menjadi 1.185,70 km² atau 19,93 % yang merupakan wilayah daratan, sedangkan luas wilayah lautan dengan panjang garis pantai 60 km dan dengan luas pengelolaan 4 mil, maka luas keseluruhan wilayah lautan, yaitu 384 km² atau 38.400 ha. Dengan demikian Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan secara keseluruhan, yaitu 156.970 ha atau 1.569,70 km².

Kabupaten Bengkulu Selatan setelah pemekaran memiliki 11 (sebelas) kecamatan, dimana masing-masing kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Adapun luas wilayah kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Manna	33,17
2	Bunga Mas	35,08
3	Kota Manna	32,16
4	Pasar Manna	5,84
5	Kedurang	234,55
6	Kedurang Ilir	58,20
7	Seginim	61,52
8	Air Nipis	203,28
9	Pino	61,88
10	Ulu Manna	236,92
11	Pino Raya	223,50

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

Ditinjau dari aspek kewilayahan (*spatial*) posisi Kabupaten Bengkulu Selatan cukup strategis, karena Kabupaten Bengkulu Selatan terletak pada jalur lintas yang menghubungkan Propinsi Bengkulu dengan Propinsi Sumatera Selatan (melalui Tanjung Sakti). Secara administratif Kabupaten Bengkulu Selatan berbatasan langsung :

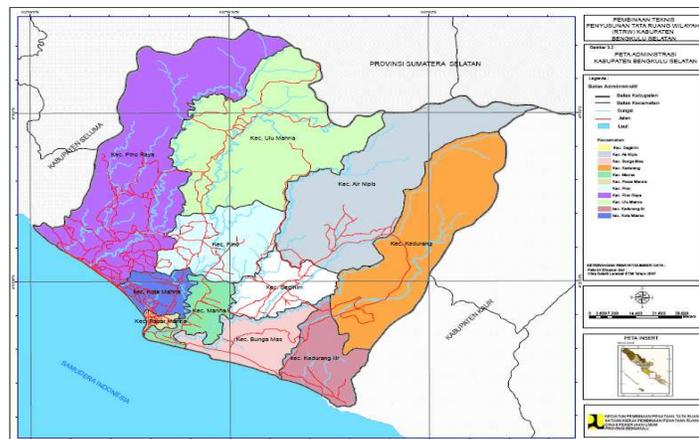
- Sebelah utara dengan Kabupaten Seluma
- Sebelah timur dengan Propinsi Sumatera Selatan
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Kaur
- Sebelah barat dengan Samudera Indonesia

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bengkulu Selatan secara geografis terletak pada $4^{\circ} - 5^{\circ}$ LS dan $102^{\circ} - 103^{\circ}$ BT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003, Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur.

Keadaan Topografi di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari daerah datar dan berbukit. Berdasarkan atas ketinggian dari permukaan laut, maka wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi atas: daerah yang berada pada ketinggian 0 - 25 m dpl seluas 6,23 %, pada ketinggian 25 - 100 m dpl seluas 44,71 %, pada ketinggian 100 - 500 m dpl seluas 34,89 %, pada ketinggian 500 - 1000 m dpl dengan luas 8,10 %, pada ketinggian > 1000 m dpl dengan luas 6,07 %.

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Bengkulu Selatan



Sedangkan untuk tekstur tanah, berdasarkan data tahun 1995 dan 2005:

- Tekstur halus dan agak halus 69,25 % dan 67,53 %
- Tekstur sedang 15,27 % dan 15,74 %
- Tekstur agak kasar 11,69 % dan 13,95 %, dan
- Tekstur kasar 3,78 % dan 2,78 %.

Data di atas menunjukkan bahwa tanah bertekstur halus dan agak halus masih mendominasi lahan seluas 67,53 % yang selama sepuluh tahun tidak banyak perubahan. Sedangkan tekstur sedang dan kasar tetap seimbang selama 10 tahun terakhir. Kedepan dapat dijadikan lahan sebagai potensi untuk pembangunan pertanian.

Kemiringan tanah di Kabupaten Bengkulu Selatan bervariasi, yaitu: wilayah yang mempunyai kemiringan 0 – 15 derajat seluas 45,86 % dari luas Kabupaten Bengkulu Selatan, wilayah yang mempunyai kemiringan 15 - 25 Derajat seluas 39,66 % dari luas Kabupaten Bengkulu Selatan. Wilayah yang mempunyai kemiringan 25 – 40 derajat seluas 10,46 %, wilayah yang mempunyai kemiringan > 40 derajat seluas 4,02 %,

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki sungai besar dan kecil yang tersebar di kecamatan-kecamatan. Sungai tersebut antara lain: Air Manna, Air Bengkenang, Air Kedurang, Air Nelengau, Air Nipis, Air Pino, Air Manna Hijau dan Air Selali. Sungai di Kabupaten Bengkulu Selatan berfungsi sebagai sumber irigasi dan sumber air minum PDAM.

Suhu udara di suatu tempat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jarak dari pantai. Suhu rata-rata maksimum antara 30°C - 33°C dan suhu rata-rata minimum 22°C - 23°C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata relatif antara 80-90%.

Iklim terbentuk oleh unsur-unsur cuaca, yaitu curah hujan, hari hujan, radiasi surya, penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban relatif, dan kecepatan angin. Besarnya unsur-unsur pembentukan iklim dapat diuraikan sebagai berikut: menurut kriteria Schmid dan Ferguson dapat diklasifikasikan kedalam tipe iklim A, menurut kriteria Mohr, dapat diklasifikasikan dalam tipe iklim 1a, menurut kriteria Oldeman, dapat diklasifikasikan dalam tipe iklim B1, menurut kriteria Koppen, dapat diklasifikasikan kedalam tipe iklim Af.

Dalam pelaksanaan pembangunan, dilakukan penelaahan terhadap pemanfaatan dan pengembangan tata ruang yang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang penting dilakukan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya.

Dalam rencana pengembangan struktur ruang di Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan penataan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Salah satu yang akan dilakukan dalam rencana struktur ruang adalah penataan pusat perkantoran yang akan dipusatkan pada satu titik lokasi, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga disusun rencana

jaringan energi sebagai upaya menyelesaikan permasalahan kurangnya energi yang dialami masyarakat selama ini.

Berkenaan dengan rencana pola ruang, perlu dilakukan evaluasi terhadap peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Hal ini penting mengingat di Kabupaten Bengkulu Selatan masih terdapat kawasan yang harus ditata kembali, terutama keberadaan hutan. Berikut data mengenai luas dan persentase hutan menurut fungsinya.

Tabel 2.2
Luas dan Persentase Hutan menurut Fungsinya

No	Fungsi Hutan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase dari Luas Wilayah
A.	Kawasan Suaka Alam/ Pelestarian Alam		
	1. Taman Nasional	-	-
	2. Cagar Alam	-	-
	3. Taman Wisata Alam	5,5	0,005
	4. Taman Buru	-	-
	5. Taman Hutan Raya	-	-
B.	Kawasan Hutan		
	1. Hutan Lindung	33.079	27,9
	2. Hutan Produksi Terbatas	14.566,96	12,29
	3. Hutan Produksi Tetap	1.579	1,33
	4. Hutan Produksi Khusus Konversi	-	-
C.	Area Penggunaan Lainnya	69.339,54	58,48

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.1. Pertanian

Pertanian tanaman pangan merupakan komoditi penyumbang pendapatan daerah yang cukup signifikan dengan hasil produksi yang relatif meningkat setiap tahun. Hal ini merupakan potensi yang baik untuk terus dikembangkan dalam rangka menopang upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, karena Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dimana pada tahun 2009 sebagaimana data dari BPS Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat luas lahan sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan seluas 11.026 Ha.

Luas lahan pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan tersebar di masing-masing kecamatan yang terbagi menjadi sawah tadah hujan dan sawah irigasi dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.3
Luas Lahan Sawah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Lahan	Jenis Sawah	
			Irigasi	Tadah Hujan
1	Manna	594	155	439
2	Bunga Mas	631	50	581
3	Kota Manna	285	12	273
4	Pasar Manna	139	73	66
5	Kedurang	1.396	1.396	-
6	Kedurang Ilir	830	653	177
7	Seginim	2.386	2.376	10
8	Air Nipis	1.910	1.910	-
9	Pino	1.040	435	605
10	Ulu Manna	614	373	241
11	Pino Raya	1.433	512	921

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2011

Tanaman yang menjadi komoditas utama di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah padi dengan jumlah produksi yang relatif meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009 sebagaimana tercatat pada Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2010 oleh BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, produksi padi sawah (*wetland paddy*) sebesar 81.775 ton. Adapun trend kenaikan jumlah produksi padi sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.2 Jumlah Produksi Padi Sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2.1.2.2. Perkebunan

Perkebunan juga menjadi salah satu sub sektor penyumbang PDRB yang cukup besar di Kabupaten Bengkulu Selatan. Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan relatif merata dan menyebar di seluruh wilayah kabupaten, dengan jenis tanaman yang bervariasi. Tanaman perkebunan yang menjadi komoditi unggulan

adalah kelapa sawit kemudian diikuti dengan komoditi lain seperti karet, kopi, coklat dan kelapa. Selain itu terdapat juga komoditas lain yang juga diusahakan oleh rakyat namun jumlahnya relatif kecil diantaranya lada, kayu manis, cengkeh, kemiri, pinang, aren, kapuk, nilam dan jahe. Usaha perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan diusahakan sendiri oleh perkebunan rakyat dan belum ada perusahaan swasta yang mengolah hasil perkebunan tersebut, sehingga hasil perkebunan selalu dibawa atau diolah di luar kabupaten. Namun, dengan perkembangan kegiatan perkebunan terutama untuk komoditi kelapa sawit, telah mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana saat ini telah dilakukan pembangunan pabrik *Crude Palm Oil* (CPO) di Kecamatan Pino Raya dan di Kecamatan Kedurang Ilir. Kedepan diharapkan dengan dibangunnya pabrik CPO tersebut, hasil panen kebun kelapa sawit milik masyarakat dapat ditampung dan diolah di Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri, sehingga secara langsung akan mempengaruhi peningkatan daya beli masyarakat yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lokasi perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan tersebar di masing-masing kecamatan, dimana pada masing-masing kecamatan memiliki perkebunan yang luasnya bervariasi antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain.

Tabel 2.4
Luas Tanaman Perkebunan Rakyat

No	Kecamatan	Jenis Tanaman Perkebunan				
		Kelapa Sawit	Karet	Kopi	Coklat	Kelapa
1	Manna	1.235	116	88	69	137
2	Bunga Mas	1.407	704,5	46	76	70
3	Kota Manna	644,7	224,5	15	76	58
4	Pasar Manna	157,5	14,5	10	6	30
5	Kedurang	132,71	335	896	182	52
6	Kedurang Ilir	1.051	938,2	157,5	39	43
7	Seginim	319	122	163	74	145
8	Air Nipis	408,3	116	687	108	101
9	Pino	966,5	465,5	87	246	52
10	Ulu Manna	879,5	592,8	660	275,5	67
11	Pino Raya	4.279,5	490	245,5	285,5	120

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2.1.2.3. Pertambangan dan Industri

Di bidang pertambangan, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi bahan galian pertambangan yang prospeknya cukup baik untuk dieksplorasi dan dimanfaatkan di masa yang akan datang, sebagai penopang sumber

perekonomian daerah. Namun dari potensi yang ada tersebut, sampai saat ini baru beberapa potensi pertambangan yang di eksploitasi dan itu pun masih termasuk kategori bahan galian yang kecil seperti batu sarak/batu tulis dan batu gamping. Kedepan diharapkan potensi-potensi yang masih terkandung di dalam perut bumi Sekundang Setungguan dapat dieksploitasi dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten yang maju, mandiri dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus.

Eksplorasi dan pemanfaatan bahan galian pertambangan harus mendapat perhatian yang lebih dari para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah dan investor dengan tetap mengedepankan prinsip *sustainable development* serta kepentingan masyarakat, sehingga nantinya tidak akan memunculkan permasalahan dan ketidaksesuaian dengan kehendak masyarakat.

Beberapa potensi bahan galian pertambangan yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Bengkulu Selatan Dalam Angka (BSDA) diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.5
Potensi Bahan Galian Pertambangan di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Bahan Galian	Lokasi
1.	Batu Gamping	Desa Batu Ampar, Kedurang Disekitar Air Bengkenang, Hulu Air Luwangan Pematang Gaung
2.	Batu Sarak/Batu Tulis	Desa Tanjung Tengah, Seginim Hulu Air Bengkenang Seginim
3.	Pasir Lempungan	Di Air Tebu Telur, Seginim (Desa Tj. Tengah)
4.	Posphat Guano	Gua Dekat Pertemuan Air Kedurang dan Air Cawang Alun, Hulu Air Kedurang
5.	Granit	Bukit Lekendi, Bukit Raja Mendara, Kec. Seginim, Pino, Kedurang
6.	Diorit	Sebelah Utara dan Timur, Bukit Raja Mendara
7.	Andesit	Bukit Raja Mendara (2.000 Ha)
8.	Marmer	Desa Sukarami Kec. Seginim
9.	Mineral Sulfida	Kec. Pino, Seginim dan Kedurang
10.	Batu Rijang	Hulu Air Bengkenang
11.	Mineral Ubahan	- Dijumpai di tempat-tempat penyelidikan di Kec. Pino, Seginim dan Kedurang - Air Purusan Bengkenang (Hulu Air Bengkenang)
12.	Batuan Piroklastik	Di sekitar Air Manna dekat Masat
13.	Biji Besi	Perbatasan Bengkulu Selatan – Lahat
14.	Minyak (Blok Bengkulu)	Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kaur
15.	Pasir Besi	Pantai Selali, Pantai Sulau
16.	Emas	Seginim

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

Kabupaten Bengkulu Selatan selain memiliki potensi bahan galian yang masih memungkinkan untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga memiliki potensi sumber daya manusia produktif dengan potensi memunculkan produk-produk unggulan yang nantinya mampu memberikan *value added* bagi daerah. Produktivitas masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan ditampakkan dengan banyaknya usaha industri kecil dan menengah yang notabene mampu menjadi pilar penegakan dan pengembangan perekonomian daerah.

Usaha industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan cenderung menyebar dan merata di setiap kecamatan dengan jenis usaha industri yang beraneka ragam. Namun yang lebih mendominasi adalah jenis usaha kelompok industri aneka (IA) yang diantaranya bergerak dalam bidang meubeler, produksi makanan dan minuman, produksi jasa, serta produksi bahan bangunan seperti batu bata.

Jenis usaha industri di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dipaparkan dalam Bengkulu Selatan Dalam Angka (BSDA) sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Usaha Industri menurut Jenis Industri dan Kecamatan

No	Kecamatan	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	Industri Aneka	Industri Logam, Mesin dan Elektronik
1	Manna	-	6	-
2	Bunga Mas	-	-	-
3	Kota Manna	-	10	-
4	Pasar Manna	-	4	-
5	Kedurang	-	-	-
6	Kedurang Ilir	-	-	-
7	Seginim	-	-	-
8	Air Nipis	-	1	-
9	Pino	-	1	-
10	Ulu Manna	-	-	-
11	Pino Raya	-	2	-

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2.1.2.4. Perikanan dan Kelautan

Potensi perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi menjadi perikanan laut dan perikanan darat. Khusus untuk perikanan laut hanya terdapat 3 (tiga) kecamatan yang mampu memproduksi yaitu Kecamatan Pasar Manna, Kedurang Ilir dan Pino Raya. Sedangkan untuk produksi perikanan darat tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.7
Produksi Perikanan Darat Per Kecamatan

No	Kecamatan	Produksi (Ton)		
		2007	2008	2009
1	Manna	8,05	7,13	5,36
2	Bunga Mas	1,16	1,16	1,13
3	Kota Manna	7,2	7,20	4,5
4	Pasar Manna	1,03	1,03	4,8
5	Kedurang	168,58	165,32	74,2
6	Kedurang Ilir	32,11	30,22	4,5
7	Seginim	315,13	37,71	564,75
8	Air Nipis	320,04	319,01	249,82
9	Pino	22,06	23,07	7,77
10	Ulu Manna	5,14	5,14	38,73
11	Pino Raya	9,23	13,29	7,46

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2.1.2.5. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu faktor penyumbang peningkatan PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan meskipun bukan merupakan faktor yang utama. Peternakan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar diusahakan oleh masyarakat yang tersebar di setiap kecamatan. Jenis ternak yang paling banyak adalah sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging dan itik. Jumlah populasi ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2009, sebagaimana data berikut:

Tabel 2.8
Populasi Ternak Menurut Jenis Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Ternak					
		Sapi	Kerbau	Kambing	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik/Itik Manila
1	Manna	1.658	916	1.162	30.286	2.104	2.238
2	Bunga Mas	1.388	968	1.085	33.667	-	1.304
3	Kota Manna	733	416	449	13.203	22.970	704
4	Pasar Manna	343	469	354	16.117	12.246	1.061
5	Kedurang	296	658	599	2.507	6.812	818
6	Kedurang Ilir	869	1.100	1.139	4.581	-	656
7	Seginim	815	822	1.646	44.173	5.632	23.112
8	Air Nipis	441	494	974	20.513	-	10.171
9	Pino	480	692	1.173	7.347	1.580	1.238
10	Ulu Manna	120	434	607	20.908	-	1.109
11	Pino Raya	2.178	531	1.419	73.132	2.605	11.206

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2.1.2.6. Sosial, Budaya dan Agama

Kabupaten Bengkulu Selatan kaya akan bermacam potensi yang dapat dikembangkan untuk memberikan nilai tambah bagi daerah, diantaranya keberagaman budaya dan agama. Keberagaman yang ada tersebut tidak kemudian memunculkan permasalahan, justru fenomena unik yang terjadi di kalangan masyarakat terjalin hubungan sosial yang baik dan harmonis. Hal ini tercermin dalam perilaku masyarakat saling membantu, bekerja sama dan bahu-membahu terutama pada prosesi 3 (tiga) siklus kehidupan manusia yaitu pada saat kelahiran (aqiqah), perkawinan (walimatul ursy) dan kematian (takziah). Sebagaimana diketahui bahwa di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki berbagai macam suku seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Suku di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Suku	Persentase (%)
1	Serawai	76,87
2	Pasemah	13,39
3	Jawa	2,89
4	Minangkabau	2,21
5	Melayu lainnya	1,06
6	Sunda	0,95
7	Batak	0,73
8	Lainnya	1,89

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2011

Keberagaman suku yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi embrio munculnya beraneka macam kekayaan budaya dalam bentuk seni tradisi maupun adat istiadat yang apabila dikemas dan dikembangkan dengan baik akan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah. Beberapa kekayaan budaya di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.10
Kekayaan Budaya (Tari-tarian dan Adat Istiadat)
di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Tari - Tarian	Adat Istiadat
1	Tari Sekapur Sirih	Seni Bedindang Mutus Tari
2	Tari Napa	Dundang Padi
3	Tari Rawas	Bimbang Adat
4	Tari Kain	Acara Kayiak Nari
5	Tari Piring	Berzanji
6	Tari Payung	Malam Gegerit
7	Tari Berempat	Padu Padan Kulau
8	Tari Setangan	
9	Tari Mak Inang	
10	Tari Andun	

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan, 2011

Selain suku-suku dan kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas, juga terdapat agama yang berbeda-beda. Namun dengan perbedaan agama tersebut, justru memberikan energy positif bagi terciptanya kehidupan di masyarakat yang saling asah, asih dan asuh. Secara nyata dapat dikatakan bahwa kerukunan hidup beragama baik kerukunan intern umat beragama maupun kerukunan antar umat beragama terjaga dan terpelihara dengan baik, sehingga kondisi kehidupan sosial, budaya dan agama di Kabupaten Bengkulu Selatan kondusif.

Berdasarkan data yang tercatat, secara mayoritas penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan memeluk agama Islam dengan data secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.11
Agama di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Agama	Persentase (%)
1	Islam	99,43
2	Protestan	0,46
3	Katholik	0,1
4	Hindu	0,01

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2011

2.1.2.7. Pariwisata

Di bidang kepariwisataan, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi dan daya tarik wisata yang dapat dikelola dan dikembangkan sebagai salah satu potensi yang mampu memberikan *value added* bagi daerah sehingga akan dapat menjadi media promosi bagi daerah agar dikenal baik dalam lingkup lokal, nasional bahkan internasional. Tentunya apabila potensi wisata ini dikembangkan secara maksimal akan mampu menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam, yang akan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah yang secara langsung maupun tidak langsung sektor perekonomian juga akan menggeliat dan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

Tabel 2.12
Potensi Wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Lokasi Wisata	Lokasi
1	Pantai Wisata Pasar Bawah	Kel. Pasar Bawah, Kec. Pasar Manna
2	Air Terjun Geluguran	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
3	Muara Kedurang	Desa Tanjung Aur, Kec. Bunga Mas
4	Tebat Rukis	Kel. Tanjung Mulia, Kec. Pasar Manna
5	Air Terjun Tiga Tingkat	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
6	Goa Suruman	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
7	Danau Ulu Seginim	Desa Tanjung Beringin, Kec. Seginim
8	Pantai Mengkudum	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
9	Bendungan Air Nipis	Desa Plk Bengkerung, Kec. Air Nipis
10	Arung Jeram Air Manna	Kec. Ulu Manna – Pino
11	Sirkuit Balap	Pagar Dewa, Kec. Kota Manna
12	Kolam Renang Pasar Bawah	Pasar Bawah, Kec. Pasar Manna
13	Pantai Bengkenang	Desa Ketaping, Manggul, Kec. Manna
14	Tebat Gelumpai	Desa Batu Lambang, Kec. Pasar Manna
15	Air Terjun Cawang	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
16	Keramat Bujang Bandan	Kedurang
17	Telaga Rajak Besi	Kedurang
18	Tebat Besar	Desa Merambung, Kec. Pino
19	Air Terjun Padang Lakaran	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
20	Tebat Niniak	Desa Selali, Kec. Pino Raya
21	Danau Ilir	Maras, Keban Jati, Air Nipis
22	Pantai Ketaping	Desa Ketaping, Kec. Manna
23	Wisata Pancur Mas	Desa Selali, Kec. Pino Raya

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk ke dalam salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang memiliki kerawanan terhadap bencana. Untuk itu dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi risiko atas bencana yang akan terjadi dan sebagai upaya untuk menjalankan mandat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB), Kabupaten Bengkulu Selatan telah memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi terkait penanggulangan bencana, diantaranya menetapkan strategi penyusunan mitigasi bencana dengan arah kebijakan antara lain meningkatkan kesiagaan dan pencegahan dini, melaksanakan tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana.

2.1.4. Demografi

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki keberagaman penduduk yang mana dalam kehidupan sehari-hari hidup berdampingan, bekerja sama, dan saling membantu. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan hasil data dari BPS dalam Bengkulu Selatan Dalam Angka tahun 2010 berjumlah 142.964 jiwa yang terdiri dari 72.786 laki-laki dan 70.178 perempuan. Laju pertumbuhan (*Growth Rate*) penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2005-2009 adalah sebesar 1,19%.

Adapun jumlah penduduk per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2007	2008	2009
1	Manna	12.417	12.677	12.938
2	Bunga Mas	5.720	5.840	5.960
3	Kota Manna	23.388	23.878	24.369
4	Pasar Manna	17.096	17.455	17.814
5	Kedurang	10.772	10.999	11.226
6	Kedurang Ilir	6.784	6.926	7.068
7	Seginim	15.223	15.543	15.862
8	Air Nipis	9.631	9.833	10.035
9	Pino	11.224	11.460	11.696
10	Ulu Manna	6.914	7.059	7.204
11	Pino Raya	18.034	18.413	18.792

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan baik itu pembangunan dalam skala nasional maupun

pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan salah satu indikatornya dapat dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, karena aspek ini sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat dapat dijabarkan ke dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

a. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi regional Kabupaten Bengkulu Selatan. PDRB dapat disajikan berdasarkan atas dasar harga berlaku dan berdasarkan atas dasar harga konstan.

Penyajian PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga berlaku memperlihatkan besaran dari nilai tambah bruto masing-masing sektor sesuai dengan keadaan pada tahun tertentu.

Berikut ini disajikan PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga berlaku:

Tabel 2.14
PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah)

NO	SEKTOR	2005		2006		2007		2008		2009	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian	242.086	33,96	272.040	33,94	305.384	33,86	339.895	33,83	361.411	33,60
2.	Pertambangan & Penggalian	2.056	0,29	2.279	0,28	2.504	0,28	2.801	0,28	3.168	0,29
3.	Industri Pengolahan	9.616	1,35	10.763	1,34	11.987	1,33	13.703	1,36	15.245	1,42
4.	Listrik Gas dan Air Bersih	1.447	0,20	1.635	0,20	1.734	0,19	1.763	0,18	1.957	0,18
5.	Bangunan	28.705	4,03	32.223	4,02	37.526	4,16	41.733	4,15	46.972	4,37
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	172.341	24,18	194.012	24,21	219.247	24,31	245.094	24,39	264.932	24,63
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	66.849	9,38	75.888	9,47	81.242	9,01	85.189	8,48	87.896	8,17
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	33.885	4,75	36.500	4,55	40.323	4,47	44.518	4,43	49.537	4,61
9.	Jasa-Jasa	155.818	21,86	176.084	21,97	201.969	22,39	230.030	22,89	244.385	22,72
	P D R B	712.803	100	801.424	100	901.915	100	1.004.726	100	1.075.503	100

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

Penyajian PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan harga tetap suatu tahun dasar, semua barang dan jasa yang dihasilkan, biaya antara yang digunakan ataupun nilai tambah masing-masing sektor dinilai berdasarkan harga tahun dasar. Penyajian seperti ini akan memperlihatkan perkembangan produktivitas secara riil karena pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan. Berikut ini disajikan PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga konstan:

Tabel 2.15
PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Lapangan Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah)

NO	SEKTOR	2005		2006		2007		2008		2009	
		(Rp)	%								
1.	Pertanian	145.212	33,24	154.562	33,40	164.476	33,48	166.100	32,24	171.394	31,84
2.	Pertambangan & Penggalan	1.226	0,28	1.266	0,27	1.318	0,27	1.448	0,28	1.598	0,30
3.	Industri Pengolahan	6.148	1,41	6.410	1,39	6.738	1,37	7.534	1,46	8.170	1,52
4.	Listrik Gas Dan Air Bersih	683	0,16	735	0,16	769	0,16	780	0,15	810	0,15
5.	Bangunan	20.076	4,60	21.079	4,56	22.743	4,63	23.880	4,64	26.243	4,87
6.	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	109.891	25,15	116.835	25,25	125.477	25,54	134.091	26,03	141.682	26,32
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	37.010	8,47	38.988	8,43	40.707	8,29	42.366	8,22	43.251	8,03
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	20.681	4,73	21.244	4,59	22.287	4,54	24.550	4,77	26.697	4,96
9.	Jasa-Jasa	95.976	21,97	101.610	21,96	106.768	21,73	114.427	22,21	118.499	22,01
	P D R B	436.903	100	462.729	100	491.283	100	515.176	100	538.344	100

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2. Laju Inflasi Kabupaten Bengkulu Selatan

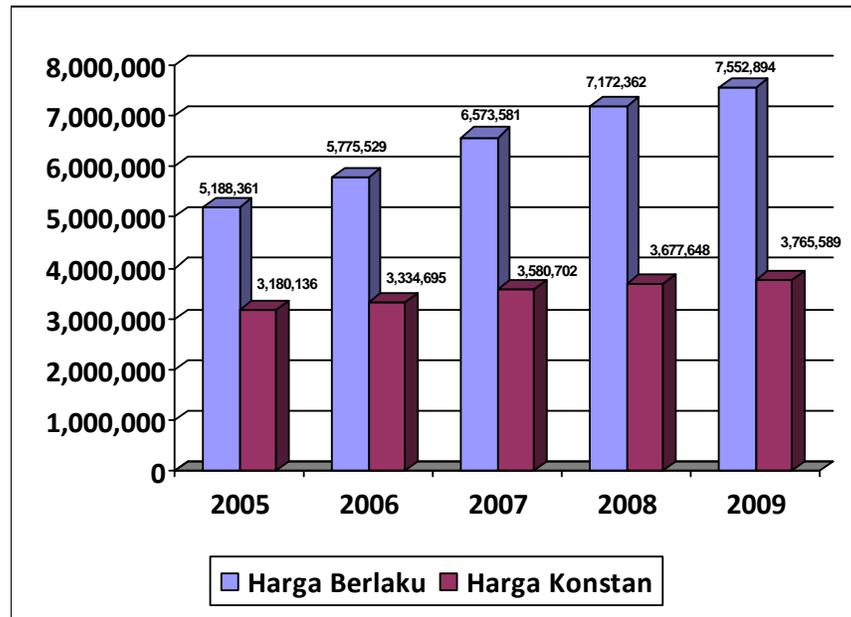
Laju inflasi pada Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2011 diperkirakan berkisar pada 4 %.

3. PRDB Per kapita Kabupaten Bengkulu Selatan

PDRB Perkapita atau yang biasa disebut pendapatan perkapita (*per capita income*) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran yang telah dicapai Kabupaten Bengkulu Selatan. PDRB Perkapita Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan kenaikan tiap tahun. Namun kenaikan tersebut belum menunjukkan kenaikan daya beli masyarakat karena kenaikan tersebut masih terpengaruh oleh adanya kenaikan harga.

PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2005 - 2009 dapat ditampilkan dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.3
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Selatan tentunya ditopang dari berbagai sektor kegiatan ekonomi yang masing-masing sektor memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.16
Sumbangan Sektor Kegiatan Ekonomi terhadap
PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkulu Selatan

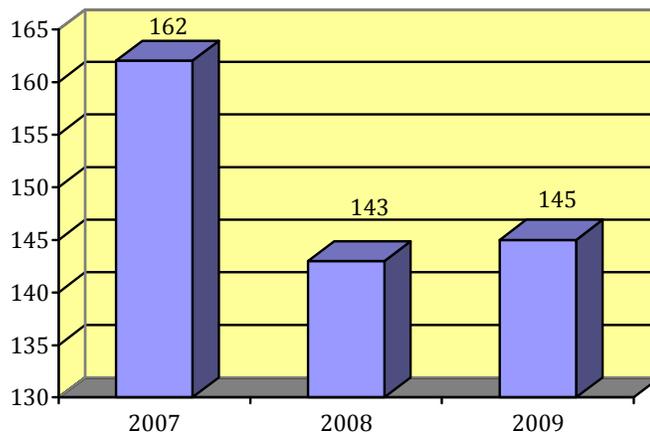
NO	SEKTOR	2007		2008		2009	
		Nilai (Juta)	%	Nilai (Juta)	%	Nilai (Juta)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertanian	305.384	33.86	339.895	33.83	361.411	33,60
2	Pertambangan dan Penggalian	2.504	0.28	2.801	0.28	3.168	0,29
3	Industri Pengolahan	11.987	1.33	13.703	1.36	15.245	1,42
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.734	0.19	1.763	0.18	1.957	0,18
5	Bangunan	37.526	4.16	41.733	4.15	46.972	4,37
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	219.247	24.31	245.094	24.39	264.932	24,63
7	Pengangkutan dan Komunikasi	81.242	9.01	85.189	8.48	87.896	8,17
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	40.323	4.47	44.518	4.43	49.537	4,61
9	Jasa – Jasa	201.969	22.39	230.030	22.89	244.385	22,72
PDRB		901.916	100	1.004.726	100	1.075.503	100

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

4. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas yang tertangani pada tahun 2009 yaitu sebesar 10,142 atau naik 0,92 dari Angka Kriminalitas yang tertangani pada tahun 2008 yaitu sebesar 9,22

Gambar 2.4
Angka Kriminalitas yang tertangani



Sumber : Polres Bengkulu Selatan, Tahun

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.17
Data Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan

NO.	URAIAN	5 TAHUN TERAKHIR				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Angka Melek Huruf	90,12	93,98	95,67	97,86	98,84
2	Angka Rata-rata lama Sekolah	97,20	97,59	98,01	98,44	98,73
3	Angka Partisipasi Kasar	98,55	98,68	98,895	99,02	99,115
4	Angka Pendidikan yang ditamatkan	94,51	95,40	96,24	97,27	97,97
5	Angka Partisipasi Murni	82,71	84,34	87,88	89,00	90,45
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	86,24	88,28	92,45	93,56	95,55
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	85,45	87,56	92,04	95,65	98,65
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	75,65	76,45	78,74	79,88	80,25

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Bengkulu Selatan, 2011

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Tabel 2.18
Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
AKBH	3.617	2.887	3.180	3.160	2.343

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2009 adalah sebesar 86,7 % dari 3114 jumlah kelahiran.

3. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Tabel 2.19
Rasio Penduduk yang Bekerja

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
Rasio Penduduk Yang Bekerja	59.250	59.651	60.523	60.751	61.219

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

Rasio Penduduk yang bekerja di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 60,7 % dari jumlah penduduk usia angkatan kerja atau sebesar 70.557 jiwa.

4. Persentase Balita Gizi Buruk di Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 2.20
Persentase Balita Gizi Buruk

NO	TAHUN	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA DENGAN GIZI BURUK	PERSENTASE	KET
1	2	3	4	5	6
1	2006	-	-	-	-
2	2007	22.039	35	0,16	-
3	2008	22.107	18	0,08	-
4	2009	18.925	27	0,14	-
5	2010	20.228	23	0,11	-

Sumber : Data Dinas Kesehatan Tahun 2010 dari Bulan Januari s/d September 2010

5. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga (4 Jenis Data) : (Jumlah Grup Dan Gedung Kesenian, Jumlah Klub OR Dan Gedung OR).

Tabel 2.21
Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah Grup	4	4	6	6	6

Sumber : Dinas Dikpora Bengkulu Selatan, 2010

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan Umum merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Pelayanan umum lebih menentukan keberhasilan pelaksana pembangunan terutama pelayanan umum yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Untuk itu aspek pelayanan umum sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari para pelaksana pembangunan. Indikator aspek pelayanan umum meliputi fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

1. Fokus Pendidikan

Tabel 2.22
Data Fokus Pendidikan

NO.	URAIAN	5 TAHUN TERAKHIR				
		2006	2007	2008	2009	2010
	Pendidikan Dasar					
1	Angka Partisipasi Sekolah	99,05	99,26	99,55	99,68	99,73
2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	1:225	1:200	1:180	1:165	1:155
3	Rasio Guru/Murid	1:25	1:22	1:15	1:12	1:10
4	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata	1:44	1:35	1:30	1:26	1:22
	Pendidikan Menengah					
1	Angka Partisipasi Sekolah	98,05	98,10	98,24	98,36	98,50
2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	1:426	1:415	1:386	1:362	1:335
3	Rasio Guru/Murid	1:20	1:18	1:16	1:14	1:12
4	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata	1:40	1:36	1:32	1:30	1:24
5	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	90,12	93,98	95,67	97,86	98,84
	Fasilitas Pendidikan					
1	Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	650	675	725	780	819
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	165	168	170	175	177
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.026	1.807	2.419	2.770	3.309
	Angka Putus Sekolah					
1	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	2,05	2,02	2,00	1,18	1,16
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,75	0,73	0,65	0,62	0,55
	Angka Kelulusan					
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,90	99,95	99,96	99,98	99,99
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	85,02	87,00	89,00	92,03	94,06
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98,60	99,25	99,75	99,80	99,87
5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,93	99,96	99,97	99,98	99,99
6	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	76,50	79,65	80,55	83,25	85,75

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bengkulu Selatan, 2011

2. Fokus Kesehatan

1. Rasio Posyandu Persatuan Balita di Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 2.23
Rasio Posyandu Per Satuan Balita

NO	TAHUN	JUMLAH POSYANDU	JUMLAH BALITA	RASIO	KET
1	2006	-	-	-	-
2	2007	182	22.039	8,3	-
3	2008	185	22.107	8,4	
4	2009	185	18.925	9,8	
5	2010	185	20.228	9,1	

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2011

- Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu persatuan penduduk di Kabupaten Bengkulu adalah sebesar 0,49.
- Rasio Rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 0,007.
- Rasio dokter per-satuan penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 0,3.
- Rasio tenaga medis per-satuan penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 4,30.
- Cakupan puskesmas di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 127,27 %.
- Cakupan pembantu puskesmas di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 372,72%.
- Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Pelayanan

Tabel 2.24
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Pelayanan

NO	TAHUN	JUMLAH BALITA DENGAN GIZI BURUK	JUMLAH BALITA GIZI BURUK YANG MENDAPAT PERAWATAN	PERSENTASE (%)	KET
1	2006	-	-	-	-
2	2007	35	35	100	-
3	2008	18	18	100	-
4	2009	27	27	100	-
5	2010	23	17	74	-

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2011

9. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Tabel 2.25
Cakupan Penemuan dan Penanganan
Penderita Penyakit DBD

No	Tahun	Jumlah Kasus Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
1	2006	69
2	2007	6
3	2008	5
4	2009	9
5	2010	4
6	2011	23*

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2011
(* = Angka Sementara)

10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)

Tabel 2.26
Cakupan Penemuan dan Penanganan
Penderita Penyakit TBC BTA (+)

No	Tahun	Jumlah Kasus Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)
1	2006	104
2	2007	133
3	2008	87
4	2009	123
5	2010	83

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2011

11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit GHTR, Malaria dan Kusta

Tabel 2.27
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Lainnya

No	Penyakit				Ket
	Rabies (GHTR)	Malaria	Kusta		
			PB	MB	
1	106	1.145	1	9	

Sumber : Dinas Kesehatan 2011

Keterangan : GHTR = Gigitan Hewan Tersangka Rabies

PB = Pausi Basiler

MB = Multi Basiler

12. Cakupan Kunjungan Bayi

Tabel 2.28
Cakupan Kunjungan Bayi

NO	TAHUN	SASARAN	KUNJUNGAN	PERSENTASE
1	2006	3627	2730	75,2
2	2007	3579	2722	76,1
3	2008	3590	2920	81,3
4	2009	3594	3114	86,7
5	2010	3890	2679	68,9

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2011

13. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Tabel 2.29
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

NO	TAHUN	SASARAN	20% SASARAN BULIN	YANG TERTANGANI	PERSENTASE
1	2006	-	-	-	-
2	2007	3757	751	523	69,6
3	2008	3770	754	652	86,5
4	2009	3735	747	424	56,8
5	2010	4045	809	221	26,31

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2011

14. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Berkompetensi Kebidanan

Tabel 2.30
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Yang Berkompetensi Kebidanan

NO	TAHUN	SASARAN	PERSALINAN OLEH NAKES	PERSENTASE
1	2006	-	-	-
2	2007	3757	2817	75,0
3	2008	3770	3014	79,9
4	2009	3735	3174	85,0
5	2010	4045	2343	57,92

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2011

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

1. Fokus kemampuan ekonomi daerah

Kemampuan ekonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersentuhan langsung dengan aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan ekonomi daerah antara lain ; angka konsumsi RT per kapita, persentase konsumsi RT untuk non pangan, produktivitas 9

sektor PDRB, pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, serta jasa-jasa.

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur merupakan pemicu pembangunan suatu wilayah serta sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan irigasi merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan air bersih serta pengelolaannya dan peningkatan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah seperti prasarana kesehatan, pendidikan, dan sarana olah raga secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Bengkulu Selatan dilalui oleh jalan arteri yang menghubungkan Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Kaur yang merupakan jalan lintas barat. Adapun rincian jalan berdasarkan permukaan pada tahun 2008 yaitu:

1. Jalan Aspal : 110,95 Km
2. Jalan Hotmix : 172,75 Km
3. Jalan Kerikil : 176,70
4. Jalan Tanah : 196,50

Berdasarkan status antara lain :

1. Panjang Jalan Negara : 91 Km
2. Panjang Jalan provinsi : 126 Km
3. Panjang Jalan Kabupaten : 911 Km

Terkait dengan penyediaan infrastruktur tersebut permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bengkulu Selatan adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur pertanian dan pedesaan. Pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi) merupakan prasarana penting dalam mendukung pembangunan pertanian untuk mencapai ketahanan pangan sedangkan pembangunan jaringan jalan merupakan prasarana transportasi yang penting untuk memperlancar distribusi barang antar daerah serta meningkatkan mobilitas penduduk. Dalam konteks pembangunan pertanian dan pedesaan, jaringan jalan sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus faktor produksi maupun pemasaran hasil.

Tabel 2.31
MATRIK INDIKATOR KUNCI UTAMA

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada N-1 s/d N-5				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
A.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	Pertumbuhan PDRB (%)	5.91	6.17	4.86	4.49	4.5
2	Laju Inflasi Kabupaten (%)	-	-	-	-	
3	PDRB per kapita (Rp)	3,334,695	3,580,702	3,677,648	3,765,589	3,824,754
4	IPM	70.08	70,44	71,03	71,57	71,61
	Pendidikan					
A.2	Kesejahteraan Sosial Pendidikan					
5	Angka Melek huruf (%)	90.12	93.98	95.67	97.86	98.84
6	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	97.2	97.59	98.01	98.44	98.73
7	Angka partisipasi murni	82.71	84.34	87.88	89.01	90.45
	SD	86.24	88.28	92.45	93.56	99.49
	SLTP	85.45	87.56	92.04	95.65	78.1
	SLTA	75.65	76.45	78.74	79.88	75.78
8	Angka partisipasi kasar	98.55	98.68	98.9	99.02	99.12
	SD					100.51
	SLTP	98.92	98.98	98.94	99.01	82.57
	SLTA	91.21	91.32	91.47	91.49	78.98
9	Angka pendidikan yang ditamatkan (tahun)	94.51	95.4	96.24	97.27	97.97
	Kesehatan					
10	Angka kelangsungan hidup bayi	3,617	2,887	3,180	3,160	2,343
11	Angka usia harapan hidup (tahun)	66	66.8	67	67.1	67.25
12	Persentase balita gizi buruk (%)	-	0.16	0.08	0.14	0.11
	Kemisikinan					
14	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	37.45	35.24	27.53	26.43	25.37
	Kepemilikan Lahan					
15	Persentase penduduk yang tidak memiliki lahan	-	-	-	-	
	Kesempatan Kerja					
16	Rasio Penduduk yang bekerja	59,250	59,651	60,523	60,751	61,219
17	Pengangguran terbuka (%)	11.32	11.55	11.78	12.05	12.53

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada N-1 s/d N-5				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
	Kriminalitas					
18	Angka kriminalitas yang tertangani	-	162	143	145	
A.3	Seni Budaya dan Olahraga					
19	Jumlah Grup Kesenian	4	4	6	6	6
20	Jumlah Gedung kesenian	-	-	-	-	
B	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B.1	Pelayanan Dasar					
	Pendidikan					
	Pendidikan Dasar					
21	Angka partisipasi sekolah	99.05	99.26	99.55	99.68	99.73
22	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	0.1979166 7	0.1805555 6	0.1666666 7	0.15625	0.1493055 6
23	Rasio Guru murid	1:25	1:22	1:15	1:12	1:10
	Pendidikan Menengah					
24	Angka partisipasi sekolah	98.05	98.1	98.24	98.36	98.5
25	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	0.3375	0.3298611 1	0.3097222 2	0.2930555 6	0.2743055 6
26	Rasio Guru murid	1:20	1:18	1:16	1:14	1:12
	Kesehatan					
27	Rasio posyandu per satuan balita	-	8.3	8.4	9.8	9.1
28	Rasio puskesmas, poliklinik pusat persatuan penduduk	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
29	Rasio dokter persatuan penduduk	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
30	Rasio tenaga medis persatuan penduduk					
	- Bidan	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	- Perawat	0.00117	0.00117	0.00117	0.00117	0.00117
	Sarana dan Prasarana Umum					
31	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-	-	-	-	
32	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	-	-	-	-	
	Perhubungan					
33	Jumlah Pelabuhan terminal bis	1	1	1	1	1
B.2	Pelayanan Penunjang					
	Penanaman Modal					
34	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal dalam negeri	-	-	-	-	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada N-1 s/d N-5				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
35	Jumlah nilai investasi berskala Nasional	-	-	-	-	
	KUKM					
36	Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD)	12	12	12	13	
37	Jumlah Koperasi Non KUD	127	138	149	163	
38	Jumlah UMKM non BPR/LKMU KM	-	-	-	-	
39	Jumlah BPR	-	-	-	-	
	Ketenagaan Kerja					
40	Angka partisipasi angkatan kerja	-	-	-	-	71.01
	KB dan KS					
41	Jumlah Pasangan Usia Subur	25,613	27,043	27,733	28,492	
42	Jumlah Peserta KB	22,986	23,201	25,277	25,534	
	Pertanahan					
43	Persentase Luas lahan bersertifikat	40	40	40	40	40
	Pemberdayaan Masyarakat Desa					
44	Jumlah LSM	-	-	-	-	
	Perpustakaan					
45	Jumlah Perpustakaan	-	-	1	1	1
46	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	-	-	760	1542	1833
	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat					
47	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0.005	0.0051	0.009	0.0066	0.0068
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
C.1	Kemampuan ekonomi Daerah					
48	Angka konsumsi RT per kapita	-	-	-	61.73	
49	Persentase konsumsi RT untuk non pangan	-	-	-	38.27	
50	Produktifitas 9 sektor PRDB	-	-	-	4.5	
51	Pertanian (Jutaan Rp)	272,040	305,384	339,895	361,411	
52	Pertambangan dan penggalian	2,279	2,504	2,801	3,168	
53	industri pengolahan	10,763	11,978	13,703	15,245	
54	Listrik	1,635	1,734	1,763	1,957	
55	Bangunan	32,223	37,526	41,733	46,972	
56	Perdagangan	194,012	219,247	245,094	264,932	
57	Pengangkutan dan komunikasi	75,888	81,242	85,189	87,896	
58	Keuangan	36,500	40,323	44,518	49,537	
59	Jasa-jasa	176,084	201,969	230,030	244,385	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada N-1 s/d N-5				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
C.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
	Aksesibilitas Daerah					
60	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	-	-	
61	Panjang Jalan	495.1	713.68	791.63	741.95	
	Fasilitas Bank					
62	Jumlah Bank	12	13	14	15	
	Fasilitas Listrik					
63	Jumlah RT yang menggunakan listrik	16,358	16,873	17,503	20,960	
	Ketersediaan Penginapan					
64	Jumlah Penginapan/Hotel	-	-	10	11	11
	Iklim Berinvestasi					
65	Angka kriminalitas	199	242	232	227	284
66	Jumlah Peristiwa Kejahatan Yang Diselesaikan	-	162	143	145	
67	Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas	-	44	41	29	
68	Sumber Daya Manusia					
69	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan	-	145	160	208	
70	Rasio Ketergantungan	-	-	-	-	

BAB 3

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH



Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini dikarenakan identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis mampu meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral maupun etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis terhadap isu strategis sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan agar organisasi dalam pelaksanaan rencana pembangunan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Mengingat pentingnya analisis tersebut, maka perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemerintahan daerah dan masyarakat di masa datang. Karena isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi di masa yang akan datang. Dengan demikian, kondisi penting tersebut apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis dalam jangka panjang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional maupun daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Memiliki dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah; dan
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

Penyajian analisis terhadap isu strategis daerah dapat dijelaskan meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan pada akhirnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Beberapa permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi oleh Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

A. Bidang pemerintahan

Seiring bergulirnya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengelola sendiri pemerintahannya, maka upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan harus diutamakan oleh pemerintah daerah. Meskipun usia peraturan perundangan yang mengawali diterapkannya otonomi daerah sudah tidak muda lagi, namun masih banyak ditemui permasalahan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan dalam pemerintahan, mulai dari pembangunan yang kurang maksimal, pelayanan publik yang masih menuai keluhan dari masyarakat, dan permasalahan lainnya.

Kondisi ini dipengaruhi oleh masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjalankan mekanisme pembangunan daerah serta belum optimalnya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Disamping itu belum optimalnya pembangunan "*capacity building*" institusi-institusi pemerintahan sehingga kurang berperan dalam alokasi sumber daya secara efektif dan efisien. Performa pemerintahan lebih tercoreng lagi oleh masih rendahnya moralitas di jajaran pemerintahan yang tercermin dalam banyaknya kasus-kasus pelanggaran asusila, narkoba maupun korupsi.

Tantangan ke depan yang dihadapi adalah penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mengingat isu ini sudah menjadi isu yang hangat dan prioritas termasuk dalam skala nasional.

B. Bidang Perekonomian

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan apabila dilihat secara makro dengan memperhatikan berbagai aspek diantaranya tingkat daya beli masyarakat, dapat dikatakan sudah ada kemajuan meskipun masih jauh dari cita-cita yang diharapkan yaitu mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Tantangan besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari kabupaten lain yang lebih maju sudah di depan mata. Kondisi ini dipertegas dengan telah ditabuhnya genderang persaingan global yang ditandai dengan disepakatinya *ASEAN-China Free Trade Agreement* pada awal tahun 2010 yang menyebabkan semakin ketatnya persaingan terutama dalam bidang ekonomi. Untuk itu upaya peningkatan dan penguatan pondasi perekonomian daerah harus terus diupayakan sehingga nantinya daerah dapat keluar dari keterpurukan dan bahkan memenangi persaingan.

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tahun 2004–2010 menunjukkan perekonomian yang belum stabil. Pada rentang tahun 2007–2008 perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami trend penurunan, hal ini disebabkan oleh dampak krisis ekonomi global. Namun pada tahun 2009 dan seterusnya perekonomian di Kabupaten Bengkulu Selatan kembali menunjukkan trend meningkat. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat. Sedangkan untuk sektor produksi belum dapat berkembang dikarenakan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah investasi, rendahnya produktivitas SDM, rendahnya penguasaan teknologi dan informasi, juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan perekonomian sehingga mengakibatkan lemahnya daya saing daerah terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah.

Perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi PDRB yang berkisar pada 33,8% setiap tahunnya. Dominasi sektor pertanian tersebut ternyata tidak diikuti dengan tingginya produktivitas pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan disebabkan rendahnya kualitas SDM dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi, transportasi dan komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran). Rendahnya produktivitas sektor pertanian secara keseluruhan mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi

permasalahan-permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas guna meningkatkan *added value* (nilai tambah) produk di sektor pertanian.

C. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia sebagai faktor utama penentu berjalan atau tidaknya pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan masih relatif rendah sehingga berpengaruh pada kreativitas dan produktivitas yang juga rendah. Hal ini sudah seharusnya mendapatkan porsi perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah. Upaya peningkatan kualitas SDM khususnya pada instansi pemerintah maupun masyarakat secara umum harus terus dilakukan, mengingat sebaik apapun program yang direncanakan dan seanggih apapun teknologi yang diterapkan tidak akan dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Secara makro beberapa indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya kependudukan, pendidikan dan kesehatan telah menunjukkan kemajuan meskipun masih jauh dari yang diharapkan. Pada tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 137.998 jiwa dengan laju pertumbuhan (*Growth Rate*) penduduk dari tahun 2005-2009 adalah sebesar 1,19%. Dengan demikian, 20 (dua puluh) tahun ke depan diperkirakan jumlah penduduk akan mengalami pertambahan yang cukup signifikan. Untuk itu pengendalian terhadap kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk tetap perlu diperhatikan guna menciptakan komposisi pertumbuhan penduduk yang seimbang dan merata dalam rangka mendukung terjadinya nilai tambah demografis yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah penduduk usia non produktif. Kondisi tersebut perlu ditargetkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, daya saing dan kesejahteraan rakyat.

Pada bidang pendidikan masih banyak ditemui permasalahan diantaranya sarana dan prasarana serta kebijakan terkait peningkatan kualitas pendidikan yang masih belum optimal. Tantangan ke depan yang dihadapi antara lain adalah penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; penurunan penduduk yang buta aksara; menurunnya kesenjangan pendidikan antara yang kaya dan miskin, di desa maupun di perkotaan serta antar jenis kelamin. Tantangan lain adalah meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga pendidikan yang dijalankan dapat

mendorong dan berperan dalam pembangunan daerah termasuk dalam mengembangkan nilai-nilai budaya dan moral.

Dalam bidang kesehatan masih ditemui kurangnya sarana dan akses pelayanan serta tenaga kesehatan baik itu tenaga medis, dokter maupun dokter spesialis. Tantangan ke depan yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, tingkat sosial ekonomi, gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan; dan meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan.

D. Bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan

Tujuan pembangunan yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan dapat dikatakan berhasil adalah ketika diperoleh indikator yang menunjukkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat diantaranya yaitu tingginya daya beli masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut maka sudah selayaknya pemerintah daerah memberikan porsi perhatian yang lebih terhadap permasalahan pembangunan daerah diantaranya:

1. Masih cukup tingginya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan;
2. Masih cukup tingginya kesenjangan sosial dalam masyarakat baik itu antar golongan pendapatan maupun antar wilayah; dan
3. Masih banyaknya desa/kelurahan maupun kecamatan yang belum mempunyai kemandirian ekonomi dan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Tantangan ke depan yang dihadapi adalah peningkatan kemampuan masyarakat untuk berusaha bangkit dari kemiskinan dengan memberikan alternatif solusi yang tepat diantaranya peningkatan kualitas sehingga memiliki kreativitas dan produktivitas yang tinggi, mengurangi kesenjangan sosial antar golongan dengan memberikan kesempatan yang sama dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta menjamin pemerataan pembangunan dengan mengutamakan peningkatan kapasitas wilayah yang tergolong tertinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan.

E. Bidang revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan

Berdasarkan data statistik yang ada diketahui bahwa sektor pertanian mampu memberikan kontribusi PDRB yang berkisar pada 33,8% setiap tahunnya. Namun kondisi tersebut masih belum mampu mendongkrak

peningkatan produktivitas sektor pertanian secara keseluruhan serta belum mampu memberikan nilai tambah produk pertanian, sehingga pada saat yang sama juga masih menjadi penyumbang tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu masih belum optimalnya penggunaan teknologi serta masih rendahnya sarana dan prasarana juga terbatasnya modal kerja dan manajemen pengelolaan menjadi permasalahan yang harus terus diupayakan penyelesaiannya.

Tantangan terbesar bagi Kabupaten Bengkulu Selatan ke depan adalah melakukan revitalisasi sektor pertanian. Melalui revitalisasi ini, diharapkan produktivitas sektor pertanian akan meningkat, sehingga pada PDRB juga akan meningkat yang secara otomatis juga berpengaruh pada peningkatan ketahanan pangan. Dari berbagai tantangan dan peluang yang akan dihadapi, secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Transformasi struktural dalam perekonomian

Arah transformasi struktur perekonomian berkembang ke arah terbentuknya struktur perekonomian yang lebih seimbang. Hal ini mempertegas bahwa pembangunan pertanian memberikan kesempatan tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lainnya, sehingga mampu memperbesar peranannya dalam PDRB.

b. Pemilikan lahan yang semakin sempit

Tantangan dalam memberdayakan petani berlahan sempit sebagai pelaku agribisnis melalui pengembangan dan penciptaan sistem kelembagaan yang mampu menjamin petani memenuhi skala usaha yang efisien dan menghasilkan komoditas andalan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

c. Pemasaran dan mutu produk

Kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan pemasaran antara lain persoalan distribusi pemasaran yang belum efisien. Hal ini dipengaruhi banyak faktor yang salah satunya adalah minimnya dukungan jalan sentra produksi yang berkualitas.

d. Kelembagaan dan kemitraan

Lemahnya posisi tawar pertanian disebabkan belum berimbanginya kemampuan antar pelaku. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan pengusaha-pengusaha perdesaan dan mengembangkan usaha dengan pola-pola kemitraan.

e. Permodalan dan investasi

Tantangan yang menghadang adalah bagaimana merumuskan kebijakan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat merangsang investor untuk berinvestasi berbasis perdesaan, serta

mengembangkan iklim kredit yang disesuaikan dengan karakteristik dari jenis usaha yang dikembangkan.

F. Bidang infrastruktur dasar

Infrastruktur merupakan syarat mutlak pendukung terlaksananya kegiatan dan peningkatan produktivitas sektor-sektor lain. Selain itu adanya infrastruktur yang memadai menjadi tolak ukur berjalan atau tidaknya pembangunan di daerah. Yang menjadi permasalahan kemudian adalah kondisi infrastruktur dasar masih banyak yang kurang pemeliharaan sehingga mengalami kerusakan. Kondisi ini memerlukan kelanjutan pembangunan sarana dan prasarana yang belum terselesaikan dan belum berfungsi optimal serta mengoptimalkan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana yang sudah ada.

Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk pemerataan pembangunan sehingga terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat dihindari dan ketertinggalan wilayah tertentu dari wilayah lainnya dapat diminimalisir.

G. Bidang Jasa dan Perdagangan

Dilihat dari aspek geografis dan demografi, wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sangat strategis, terletak pada jalur lalu lintas yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Namun potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan masih minimnya kemampuan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan, yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat produksi baik jasa maupun barang terutama dari segi kualitas. Selain itu akses terhadap permodalan juga menjadi pemicu rendahnya produktivitas masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kedepan diharapkan dengan potensi yang baik tersebut, pembangunan di bidang jasa dan perdagangan dapat menjadi salah satu solusi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

H. Bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan mitigasi bencana

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi yang relatif besar di sektor sumber daya alam. Namun demikian, tantangan 20 tahun ke depan adalah bagaimana mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan dengan tiga pilar, yaitu secara ekonomi *feasible*, secara sosial *acceptable* dan ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat masih rendah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga

menyebabkan belum optimalnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup masih belum berjalan secara maksimal. Ke depan diperlukan langkah riil dan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam yang selalu memelihara dan menjaga keserasian dan kelestariannya dengan melakukan reformasi kebijakan dalam penanganannya, peningkatan kesadaran masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu.

Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai salah satu daerah yang masuk dalam *ring of fire* (daerah rawan bencana) tentunya harus mengupayakan secara optimal mitigasi bencana dengan peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana alam. Hal ini penting sebagai upaya mempersiapkan secara dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam agar dapat mengurangi resiko yang ditimbulkan.

I. Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang

Tantangan pengembangan wilayah dan penataan ruang di Kabupaten Bengkulu Selatan ke depan adalah menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, mengurangi kesenjangan pembangunan antara di perkotaan dan perdesaan, penetapan kawasan-kawasan strategis, mengupayakan keberlanjutan areal pertanian serta perencanaan alih fungsi hutan.

Tantangan kewilayahan pada masa yang akan datang adalah pengaturan tata ruang kewilayahan harus mengacu pada pembangunan berkelanjutan secara proporsional dengan memegang teguh prinsip keserasian dan keselarasan dengan alam/lingkungan. Dalam upaya menjaga konsistensi ketataruangan di masa yang akan datang diperlukan berbagai langkah sebagai berikut:

1. Penegakan disiplin dan aturan hukum yang mengikat kepada seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha;
2. Meningkatkan sinkronisasi perencanaan tata ruang antar level pemerintah; dan
3. Meningkatkan kompetensi kinerja aparat pengendali tata ruang dan pertanahan dengan melibatkan komponen masyarakat; serta
4. Meningkatkan pengawasan yang efektif melalui sistem dan prosedur monitoring dan evaluasi yang jelas.

J. Bidang pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak untuk dikembangkan sebagai salah satu upaya percepatan

pembangunan daerah. Namun sampai saat ini perencanaan dan pengembangan potensi wisata masih belum optimal, belum terpadu dan belum terintegrasi serta belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan promosi wisata belum optimal. Tantangan ke depan adalah mengembangkan pengelolaan potensi wisata yang ada sehingga mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bidang kebudayaan, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki beraneka ragam budaya yang tentunya memerlukan perhatian dan pembinaan sehingga dapat dikembangkan sebagai upaya pengembangan kreativitas masyarakat.

Di bidang teknologi, peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan teknologi dan informasi menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan derasnya arus globalisasi telah membuka peluang meningkatnya persaingan. Dengan penguasaan teknologi informasi diharapkan mampu memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai hal. Tantangan ke depan diantaranya adalah meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi informasi baik SDM, sarana prasarana maupun pembiayaan, serta pengembangan budaya iptek di tengah masyarakat.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis dinamika lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian untuk menentukan tujuan di masa yang akan datang. Beberapa isu strategis daerah sebagai modal dasar pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

A. Tata Pemerintahan yang Baik

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif, serta didalamnya mengatur pola hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik meliputi tata pemerintahan untuk sektor publik (*good public governance*) yang merujuk pada lembaga penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan adanya partisipasi aktif dari masyarakat (*civil society*). Para pihak inilah yang sering disebut sebagai 3 (tiga) pilar penyangga penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Secara

umum terdapat 4 (empat) prinsip utama dalam tata pemerintahan yang baik, yakni transparansi, partisipasi, penegakan hukum dan akuntabilitas.

B. Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan daerah rawan bencana

Secara geografis, Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk dalam daerah yang rawan terhadap bencana. Ke depan perlu dilakukan langkah-langkah riil sebagai antisipasi terhadap terjadinya bencana sehingga dapat meminimalisir resiko yang ditimbulkannya. Peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana alam adalah hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah.

C. Peningkatan sarana dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan

Derasnya arus globalisasi membawa dampak yang signifikan dengan semakin meningkatnya persaingan di segala bidang, terutama penyediaan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Untuk itu penyediaan dan peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi.

D. Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang

Pengaturan tata ruang kewilayahan perlu dilakukan agar pembangunan berkelanjutan yang proporsional dengan memegang teguh prinsip keserasian dan keselarasan dengan alam/lingkungan dapat terus dilakukan. Pengembangan wilayah dan penataan ruang dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, mengurangi kesenjangan pembangunan, penetapan kawasan-kawasan strategis, serta perencanaan alih fungsi lahan.

E. Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk pemerataan pembangunan sehingga terjadinya kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat dihindari. Secara sekilas, Kabupaten Bengkulu Selatan telah memiliki pondasi yang kuat dalam hal pembangunan karena telah didukung oleh infrastruktur yang bisa dikatakan merata di semua wilayah dalam kabupaten. Namun, kondisi yang justru menjadi permasalahan bagi Kabupaten Bengkulu Selatan adalah belum maksimalnya pemeliharaan infrastruktur yang ada tersebut, sehingga banyak ditemui infrastruktur baik itu jalan, jembatan dan lain-lain yang sudah rusak dan membutuhkan perbaikan, peningkatan dan bahkan pembangunan baru.

F. Pertumbuhan Ekonomi yang semakin meningkat

Masih rendahnya dan masih belum stabilnya serta belum meratanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah sehingga pertumbuhan ekonomi dapat mengarah pada peningkatan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan pada 20 tahun ke depan diharapkan dapat menunjukkan geliat pertumbuhan yang signifikan, karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, mengindikasikan semakin tingginya tingkat kesejahteraan daerah tersebut. Isu pembangunan ke depan terutama dalam bidang ekonomi, tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonominya saja tetapi juga dari sisi pemerataannya (*equity*), sehingga kesejahteraan masyarakat secara luas tidak hanya akan terwujud dengan pertumbuhan ekonomi saja tetapi distribusi pendapatan akan merata ke setiap masyarakat.

G. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), karena SDM yang berkualitas akan mampu menyumbangkan produktivitas dan kreativitas yang baik. Untuk itu peningkatan kualitas SDM harus dilakukan secara terus menerus sebagai modal dasar keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, kualitas SDM juga memberikan efek yang positif bagi peningkatan kinerja dan etika sehingga secara otomatis akan mampu menekan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

BAB 4

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. VISI

Perumusan visi dan misi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting karena mencerminkan keadaan yang diinginkan dan diharapkan dari hasil pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Visi merupakan rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sejalan dengan tujuan pembangunan pada umumnya yaitu mensejahterakan masyarakat lahir dan bathin, strategi pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan menempatkan pembangunan daerah yang bertumpu pada agroindustri serta pengembangan kualitas sumber daya manusia menjadi landasan dan modal dasar serta titik awal guna menuju kemajuan dan kesejahteraan yang dicita-citakan pada 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Atas dasar kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 adalah:

**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN
YANG SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI DAN DEMOKRATIS BERBASIS
AGROINDUSTRI DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH"**

Visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 tersebut mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan secara nasional, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyatakan, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian, keadilan, kemakmuran, aman, demokratis, kesejahteraan dan bermartabat yang ingin dicapai.

Penjelasan Visi

1. **Sejahtera** : sejahtera merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan spiritual.

Dalam visi ini, sejahtera mempunyai makna kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dipenuhi secara lahir dan bathin. Masyarakat yang sejahtera merupakan wujud dari masyarakat yang adil dan makmur, baik dari sisi material maupun spiritual. Kesejahteraan juga tercermin dalam semua aspek kehidupan, dimana masyarakat memiliki akses yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya, memperoleh pendidikan, kesehatan, dan serta berusaha dalam semua bidang yang berbasis agroindustri.

2. **Maju** : maju diartikan sebagai wujud kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang aman dimana masyarakat memiliki kualitas hidup yang baik berbasis agroindustri dan sumber daya manusia yang tangguh.

Dalam visi ini, maju mempunyai makna bahwa kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah memenuhi standar indikator yang telah ditentukan. Ditinjau dari indikator sosial, daerah dikatakan maju diukur dari kualitas sumber daya manusianya yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Selain itu maju juga diukur berdasarkan indikator kependudukan dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, daerah dikatakan maju diukur dari tingginya pendapatan rata-rata masyarakat. Disamping unsur-unsur tersebut, bangsa yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju

3. **Mandiri** : Mandiri diartikan sebagai wujud dari kondisi masyarakat dan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang terbebas dari ketertinggalan, ketergantungan, dan kemiskinan sehingga tercipta masyarakat yang berkualitas berbasis agroindustri dan sumber daya manusia yang tangguh.

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri dan daerahnya. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Daerah mandiri adalah daerah yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan

mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kualitas sumber daya manusia serta kemajuan ekonomi terutama yang berbasis agroindustri untuk meningkatkan daya saing.

4. **Demokratis** : Demokratis dalam arti bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Keadilan ini harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, perlindungan dan kesamaan di depan hukum, transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender dan daerah.

Dari pernyataan visi diatas dapat dilakukan pemilahan menjadi perwujudan visi, sebagai berikut:

1. Kabupaten Bengkulu Selatan yang sejahtera berbasis sumber daya manusia yang tangguh
2. Kabupaten Bengkulu Selatan maju berbasis agroindustri dan sumber daya manusia yang tangguh
3. Kabupaten Bengkulu Selatan mandiri berbasis agroindustri dan sumber daya manusia yang tangguh
4. Kabupaten Bengkulu Selatan yang demokratis

4.2. MISI

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam usahanya mewujudkan visi. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM berasas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**

Pembangunan difokuskan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh yaitu manusia yang berkarakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki semangat patriotisme dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memahami nilai-nilai budaya bangsa.

Pembangunan daerah yang dilakukan diarahkan untuk menjamin tercapainya pemerataan yang seluas-luasnya di dukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat secara merata terhadap peningkatan kualitas hidup.

Peningkatan kualitas SDM dilakukan sebagai modal dasar terlaksananya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini menekankan pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tangguh, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan dan berdaya saing.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, professional dan tanggung jawab

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdiri pada tiga pilar utama, yakni; pertama, prinsip partisipasi yang menghendaki terakomodasinya aspirasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam berbagai tahapan pembangunan. Kedua, prinsip transparansi yang mempersyaratkan adanya akses bagi pemangku kepentingan untuk memperoleh segala informasi terkait dengan pembangunan dan pemerintahan. Ketiga, prinsip akuntabilitas yang menuntut adanya pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas setiap keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang ditetapkan.

Tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi isu strategis dan bahkan sudah menjadi isu nasional yang harus diupayakan pencapaiannya. Hal ini penting karena apabila hal tersebut dapat dicapai, maka pemerintahan yang ada akan mampu menampilkan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, sehingga secara langsung akan memberikan pengaruh yang positif pada pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan lain-lain.

Misi ini menekankan pada upaya mewujudkan kinerja penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang semakin meningkat dengan didukung oleh peningkatan profesionalisme aparatur daerah, aparatur anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang nantinya secara otomatis akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimum.

3. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang maju, produktif dan memiliki keleluasaan akses terhadap pembangunan

Pada hakekatnya pembangunan yang dilakukan adalah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang maju baik dari segi pemikiran, pengalaman, serta akses terhadap faktor-faktor pendukung terlaksananya pembangunan. Tingkat kemajuan suatu daerah dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu daerah menjadikan daerah tersebut lebih makmur dan lebih maju. Daerah yang maju pada umumnya adalah daerah yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan, peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Selain unsur-unsur tersebut, daerah yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.

4. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan kawasan ekonomi baru, dan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri

Ketersediaan infrastruktur memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung

oleh infrastruktur yang maju guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat secara merata terhadap sarana dan prasarana kebutuhan dasar terutama yang berkaitan dengan infrastruktur ekonomi. Hal ini penting karena penguatan terhadap ekonomi akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan kawasan ekonomi baru dan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri menjadi pilihan yang tepat sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten Bengkulu Selatan yang mayoritas memiliki produktivitas tinggi dalam sektor pertanian yang terdiri dari tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Hal ini terlihat dari besarnya sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai 33,60%.

Selain itu pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan kawasan ekonomi baru dan komoditas unggulan dengan pendekatan agrobisnis diprioritaskan untuk menunjang kemandirian dan mengentaskan Kabupaten Bengkulu Selatan dari keterbelakangan dan ketertinggalan. Kondisi ini didasari pada Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal yang menempatkan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai daerah yang bukan lagi tertinggal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2010, sedangkan kondisi riil di lapangan masih banyak wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan yang belum memiliki kemandirian terutama dari segi ekonomi, dan cenderung masih tertinggal dari daerah lainnya.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur ekonomi diindikasikan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan wilayah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, pemerataan ketersediaan akses yang sama terhadap berbagai pelayanan, sarana dan prasarana ekonomi serta menghilangkan adanya perbedaan (diskriminasi) dalam berbagai aspek.

5. Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri Berbasis Agroindustri Terpadu

Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai kondisi alam dengan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan dimaksimalkan sebagai modal dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi yang dominan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah dari sektor pertanian yang mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 33,60 %.

Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan pembangunan terutama pada sektor yang berbasis agroindustri sehingga sesuai dengan kehendak rakyat dan langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini didasarkan pada kondisi dimana sektor pertanian masih mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian dan mempunyai *multiplier effects* yang sangat besar. Oleh karena itu keberpihakan kepada petani serta dorongan untuk memajukan sektor pertanian merupakan keharusan khususnya dalam pembangunan agroindustri, sehingga petani tidak hanya diposisikan sebagai pekerja maupun buruh tetapi ada langkah konkret pemberdayaan petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.

6. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal

Kabupaten Bengkulu Selatan berdiri kokoh berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang dicirikan oleh perilaku yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, keagungan akhlak, toleransi antar individu dan bergotong royong, meskipun terdapat keberagaman agama dan budaya. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan diarahkan pada penguatan kelembagaan sosial, menerapkan nilai-nilai kebersamaan dan menanamkan kebanggaan sebagai masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan formal maupun informal yang diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum dan memelihara kerukunan intern maupun antar umat beragama.

Melihat kondisi saat ini, dimana arus globalisasi telah menunjukkan dampak-dampak yang kurang baik, diantaranya bebasnya masyarakat mengenal nilai-nilai kehidupan yang berasal dari budaya asing, terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya dari luar, kecenderungan mengadopsi budaya asing yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam nilai-nilai budaya lokal. Kondisi ini tercermin dari perilaku generasi muda di Kabupaten Bengkulu Selatan yang mulai meninggalkan nilai-nilai agama dan budaya lokal, cenderung berperilaku *hedonistic* dan individual.

Meskipun sedikit banyak globalisasi memberikan manfaat, namun upaya mengantisipasi nilai-nilai budaya asing yang justru mereduksi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang berkembang di tengah masyarakat harus terus diupayakan dengan merumuskan kebijakan yang ditujukan pada pemberdayaan institusi atau lembaga sosial, lembaga keagamaan dan lembaga kepemudaan.

7. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan dengan tetap memperhatikan keselarasan yang menjamin penciptaan ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat sebagai perwujudan kehidupan yang aman dan demokratis. Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang dibutuhkan agar interaksi sosial dapat berlangsung normal, sehingga aktivitas-aktivitas lain terkait dengan kebutuhan hidup manusia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Apabila interaksi sosial dapat berlangsung normal, maka ancaman terhadap ketentraman, keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dapat diminimalisir, dengan memberdayakan kehidupan masyarakat yang senantiasa memperhatikan kaidah dan norma yang berlaku sehingga supremasi hukum dapat diwujudkan.

Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki keberagaman dalam aktivitas sosial serta aktivitas politik, yang membutuhkan kerangka kebijakan yang tepat sehingga setiap masyarakat memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat serta memiliki kesempatan yang sama mendapatkan perlindungan hukum.

BAB 5

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Dalam rangka mendukung mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan visi daerah tahun 2005-2025, yaitu; ***TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN YANG SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI DAN DEMOKRATIS BERBASIS AGROINDUSTRI DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH.***

Sebagai upaya mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, perlu disusun arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sehingga apa yang akan dicapai dalam pembangunan daerah selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD secara bertahap. Arah kebijakan tersebut merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD.

5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk Masing-Masing Misi

Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 untuk masing-masing misi dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan

MISI DAERAH	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
<p><u>Misi I</u> Mewujudkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM berbasis pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</p>	<p>1. Meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas yang merata bagi seluruh masyarakat</p>	<p>1. Peningkatan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan</p> <p>2. Peningkatan kompetensi dasar tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang tangguh</p> <p>3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah</p>
	<p>2. Meningkatkan aksesibilitas yang merata bagi seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas</p>	<p>1. Peningkatan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan</p> <p>2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan</p> <p>3. Peningkatan upaya kesehatan pada komunitas khusus (ibu, bayi, balita, lansia dan kelompok miskin)</p> <p>4. Peningkatan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk hidup sehat demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi</p>

MISI DAERAH	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
	3. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha 2. Peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan dan kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha melalui pendidikan dan keterampilan teknis sehingga mampu bersaing di era global 3. Peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya lokal dan produk unggulan daerah 4. Pengurangan tingkat pengangguran terbuka dengan peningkatan keterampilan kerja melalui Lokal Latihan Kerja (LLK) sebagai sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pemuda putus sekolah.
	4. Peningkatan kualitas SDM termasuk peran perempuan dalam pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dengan penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan. 2. Peningkatan proporsionalitas, partisipasi dan peran serta kaum perempuan di dalam politik dan pemerintahan yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip rekrutmen dan kaderisasi yang baik. 3. Pemberdayaan perempuan dengan peningkatan wawasan, keterampilan dan pendampingan 4. Peningkatan keluasan aksesibilitas perempuan terhadap peningkatan pendidikan dan kesehatan

MISI DAERAH	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
	5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (<i>sustainable development</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan sumber daya alam dengan senantiasa memperhatikan keserasian dan keseimbangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat 2. Penerapan prinsip-prinsip <i>sustainable development</i> yaitu pembangunan yang dilakukan harus efisien dan bertanggung jawab atas lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya terbatas termasuk Sumber Daya Alam (SDA)
Misi II Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, professional dan tanggung jawab	1. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kualitas aparatur pemerintahan yang diarahkan untuk mewujudkan sosok aparatur yang profesional, berakhlak mulia dan berkarakter 2. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas aparatur 3. Pengembangan manajemen aparatur yang baik dan bertanggung jawab dengan mendorong pola pengembangan karir yang mengarah pada profesionalisme, standar kompetensi dan kesejahteraan aparatur
	2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan sesuai dengan standar pelayanan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada profesionalisme, efisiensi dan efektifitas urusan birokrasi 2. Penetapan Standar Pelayanan minimal (SPM) dan prosedur standar operasional (SOP) untuk mencapai kinerja pelayanan yang optimal

MISI DAERAH	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
		<p>3. Pengembangan Sistem Informasi manajemen daerah yang memadai melalui pembangunan perangkat daerah yang selaras dan sinergis</p> <p>4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima yang diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat melalui identifikasi kebutuhan masyarakat sehingga layanan yang diberikan benar-benar riil sesuai kebutuhan masyarakat</p>
	3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik dan berwibawa	<p>1. Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh sistem administrasi yang terintegrasi, efektif dan efisien.</p> <p>2. Pemberdayaan aparatur pemerintah yang mumpuni dan bersih, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai</p>
<p>Misi III Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang maju, produktif dan memiliki keleluasaan akses terhadap pembangunan</p>	1. Terwujudnya Kabupaten Bengkulu Selatan yang maju	<p>1. Peningkatan indikator kemajuan daerah yang meliputi laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.</p> <p>2. Mengembangkan ekonomi yang tercermin pada tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi diseluruh daerah terutama sektor industri dan sektor pertanian</p>

MISI DAERAH	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
	2. Meningkatnya produktivitas masyarakat dengan dukungan keleluasaan akses terhadap pembangunan	1. Peningkatan peluang masyarakat untuk beraktivitas dan berusaha meningkatkan taraf hidupnya melalui penguasaan teknologi dan informasi 2. Peningkatan kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi aktif terhadap pembangunan serta turut menikmati hasil pembangunan
Misi IV Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan kawasan ekonomi baru, dan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri	1. Meningkatnya akses secara merata bagi masyarakat terhadap sarana dan prasarana kebutuhan dasar (listrik, air bersih, pemukiman, transportasi dan lain sebagainya) di seluruh wilayah terutama yang berbasis agroindustri	1. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada pemerataan aksesibilitas antar wilayah dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta pengentasan kemiskinan 2. Pembangunan sarana dan prasarana yang secara kuantitas dan kualitas ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat 3. Pemerataan pendapatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah
	2. Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi dalam rangka mempercepat proses produksi, promosi, distribusi dan pemasaran hasil-hasil komoditas unggulan daerah berbasis agroindustri	1. Pembangunan sarana dan prasarana (produksi, distribusi dan pasar) yang terintegrasi sehingga akan melahirkan kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan berbasis agroindustri 2. Peningkatan aksesibilitas dari kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan-tujuan pemasaran yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk – produk unggulan berbasis agroindustri

MISI DAERAH	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
		3. Pengembangan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh
	3. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah	1. Pengembangan kreativitas masyarakat dan peningkatan prestasi masyarakat di segala aspek kehidupan 2. Peningkatan kualitas pemuda terutama pada bidang iptek, ekonomi, sosial budaya dan politik, serta bidang olahraga yang difokuskan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga
	4. Berkembangnya kawasan ekonomi baru, dan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri	1. Pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi baru melalui upaya penciptaan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri 2. Penyusunan masterplan percepatan, perluasan dan pembangunan wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan berbasis agroindustri
Misi V Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri Berbasis Agroindustri Terpadu	1. Berkembangnya sistem agroindustri terpadu	1. Pembangunan sektor pertanian yang diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah 2. Mengembangkan produktivitas pertanian untuk menghasilkan produk-produk pertanian secara modern 3. Pembangunan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam khususnya pertanian yang dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

MISI DAERAH	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
	2. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian unggulan	1. Pembangunan sektor industri diarahkan untuk memperkuat basis industri pertanian yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal, nasional maupun internasional 2. Pengembangan sektor-sektor strategis sebagai motor penggerak kegiatan pertanian agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh
Misi VI Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal	1. Terwujudnya karakter masyarakat yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan saling toleransi antar individu	1. Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan yang diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai 2. Penciptaan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan intern umat beragama maupun kerukunan antar umat beragama 3. Pembentukan jati diri masyarakat yang berbudi pekerti luhur, beretika, beradab dan mempunyai toleransi yang tinggi antar individu dalam masyarakat
	2. Berkembangnya kegiatan pelestarian norma dan nilai-nilai budaya daerah yang menunjang pelaksanaan pembangunan daerah	1. Optimalisasi peran serta tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dalam membina kehidupan sosial yang aman, damai, solider harmonis dan agamis 2. Mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur dalam rangka peningkatan kualitas budaya masyarakat. 3. Melestarikan dan mengapresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional lokal. Pembinaan kehidupan sosial yang maju dan mandiri

MISI DAERAH	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Misi VII Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan norma, peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku	1. Membangun ketertiban masyarakat melalui pembinaan, bimbingan ketertiban dan kemasyarakatan. 2. Menciptakan situasi yang kondusif untuk mempererat tali persaudaraan diantara masyarakat 3. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi
	2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai kebersamaan, saling toleransi antar individu serta hamonisasi dalam kehidupan bermasyarakat	1. Peningkatan budaya dan kesadaran politik untuk generasi muda dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan, kenegaraan, kesetiakawanan dan solidaritas 2. Pendidikan politik yang diarahkan pada terwujudnya kesadaran berpolitik masyarakat dan terjaminnya hak-hak politik secara proporsional dalam koridor hukum

5.2. Tahapan dan Prioritas

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang serta menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Setiap sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diuraikan kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut:

A. RPJMD I (2005-2010)

Masa berlaku dokumen RPJPD ditetapkan selama 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2005-2025. Oleh karena itu, periode pertama RPJPD di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan RPJMD I. Dalam periode RPJMD I tahun 2005-2010, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan hanya dapat dilakukan terhitung sejak 2007-2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan kurun waktu tahun 2005-2007 arah pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan berpedoman pada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) periode yang sudah ditetapkan.

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJMD I diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang sejahtera melalui pembangunan pertanian yang berbasis agribisnis dan agroindustri serta kehidupan yang maju, mandiri, aman, demokratis dan bermartabat.

Agenda pembangunan yang dilakukan diantaranya adalah menciptakan Kabupaten Bengkulu Selatan yang aman dan damai, adil dan demokratis serta meningkatkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Dalam rangka melaksanakan agenda tersebut, ditetapkan beberapa prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu: 1) Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; 2) Tingkat efisiensi dana pembangunan (barang dan jasa) yang memberikan peningkatan produktivitas; 3) Perbaikan kebijaksanaan ekonomi pembangunan; 4) Optimalisasi tingkat eksploitasi sumber daya alam; 5) Perbaikan kondisi infrastruktur ekonomi; dan 6) Revitalisasi proses desentralisasi, otonomi daerah, supremasi hukum dan HAM, dan peningkatan ketentraman dan ketertiban.

Kabupaten Bengkulu Selatan yang sejahtera ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan yang secara otomatis meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada RPJMD I ini diharapkan dapat dicapai keunggulan dalam bidang pertanian sebagai titik awal pengembangan agribisnis dan agroindustri.

B. RPJMD II (2010-2015)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1, RPJMD ke-2 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Kabupaten Bengkulu Selatan di segala bidang dengan menekankan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tangguh termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian berbasis agroindustri.

Pada RPJMD II ini diharapkan kesejahteraan rakyat terus meningkat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan meningkatnya pendidikan masyarakat; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak.

Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan sektor pertanian berbasis agroindustri, peningkatan pembangunan sektor perikanan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; penyediaan infrastruktur dasar yang lebih memadai; penataan kelembagaan ekonomi yang baik. Selain itu penguatan daya saing perekonomian juga didorong oleh berkembangnya sektor jasa dan perdagangan, serta pariwisata. Pembukaan dan penguatan peluang investasi di daerah semakin diperluas sebagai faktor pendorong bergerak majunya perekonomian menuju perekonomian yang stabil dan maju.

Pembangunan bidang pemerintahan difokuskan pada peningkatan sistem birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan menekankan kepada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah. Indikasi pembangunan ke arah tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan meningkatnya kompetensi aparatur, meningkatnya layanan informasi publik, tertatanya kelembagaan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, terselenggaranya pemerintahan yang bebas KKN, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta meningkatnya ketentraman dan ketertiban.

Pembangunan bidang tata ruang difokuskan pada sinkronisasi rencana tata ruang melalui penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan sosialisasi

rencana tata ruang sehingga ke depannya pembangunan yang dilakukan tetap mengedepankan dan menjamin keserasian serta keselarasan dengan lingkungan.

C. RPJMD III (2016-2020)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2, RPJMD ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Pembangunan pendidikan dilakukan sebagai kelanjutan program pembangunan dari program pembangunan pada tahap sebelumnya yaitu dengan terus meningkatkan pembangunan pendidikan anak usia dini untuk mendukung keberlanjutan program wajib belajar 9 tahun; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang tanggap terhadap teknologi; semakin meningkatnya kompetensi tenaga pengajar dengan bekal iptek.

Pembangunan sektor ekonomi dalam upaya peningkatan daya beli masyarakat difokuskan pada pengembangan sektor-sektor potensial seperti pertanian dengan fokus utama agroindustri yang merupakan keterkaitan pembangunan sektor pertanian yang telah direncanakan pada tahap pembangunan sebelumnya dengan sasaran pengembangan ekonomi mikro, kecil dan menengah yang dapat merangsang tumbuhnya industri yang sehat dan kuat. Pada saat yang sama juga dikembangkan sektor jasa, perdagangan dan pariwisata sebagai pendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Pembukaan dan penguatan peluang investasi di daerah semakin diperluas sebagai faktor pendorong bergerak majunya perekonomian menuju perekonomian yang stabil dan maju.

Sejalan dengan membaiknya kesejahteraan rakyat, semakin merata dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak; tercapainya kondisi pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mantapnya budaya serta karakter daerah.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari, sejalan dengan penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan pada bidang pemerintahan masih tetap difokuskan pada penataan kembali sistem birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Pada tahap ini masih dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah, sehingga aparatur memiliki kinerja yang baik, produktivitas tinggi serta kreativitas

optimal. Hal ini berkaitan erat dengan penciptaan pelayanan prima terhadap masyarakat dan pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Selain itu pada tahap ini juga fokus pada peningkatan sarana prasarana, penguasaan teknologi, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, penegakan supremasi hukum dan HAM, peningkatan ketentraman dan ketertiban, peningkatan proses politik dan budaya politik, lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan proses pembangunan.

Pembangunan bidang penataan ruang pelaksanaannya mempedomani RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan.

D. RPJMD IV (2021-2025)

Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, RPJMD ke-4 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh, mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai daerah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum; terciptanya rasa aman dan adil bagi masyarakat.

Pembangunan pendidikan dilakukan sebagai kelanjutan program pembangunan pada tahap sebelumnya dengan terus meningkatkan pembangunan pendidikan anak usia dini untuk mendukung keberlanjutan program pendidikan dasar 9 tahun; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang tanggap terhadap teknologi; semakin meningkatnya kompetensi tenaga pengajar dengan berbekal iptek.

Dalam pembangunan kesehatan masyarakat diarahkan pada peningkatan indeks kesehatan (umur harapan hidup). Hal ini dapat diindikasikan dengan terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan ditandai ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan didukung oleh teknologi; terpenuhinya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang berdaya guna; terpenuhinya pelayanan kesehatan terpadu sampai pada tingkat lingkungan; dan terciptanya kualitas lingkungan yang sehat dengan peran serta masyarakat yang semakin meningkat.

Pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi, prasarana, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas produk dan meningkatkan iklim investasi untuk mendorong peningkatan daya saing perekonomian daerah. Pengembangan sektor jasa dan perdagangan semakin

ditingkatkan sebagai optimalisasi potensi daerah menuju Kabupaten Bengkulu Selatan yang berdaya saing tinggi. Dalam bidang pariwisata difokuskan dengan terus meningkatkan pembangunan infrastuktur pariwisata yang telah berkembang dan menggali potensi pariwisata baru yang potensial khususnya ekowisata, dengan memanfaatkan dan memperhatikan keterpaduan antara sumberdaya yang ada; meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang profesional dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan; meningkatkan sosialisasi dan promosi keberadaan pariwisata di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap ini diarahkan untuk lebih memantapkan kembali tata pemerintahan yang baik, ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal di semua penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, kemampuan dan profesionalisme aparatur semakin meningkat, sarana dan prasarana yang baik dan proporsional, penegakan hukum, demokrasi dan budaya politik yang seimbang, ketentraman dan ketertiban semakin membaik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan semakin meningkat.

Pembangunan lebih diarahkan pada pemeliharaan dan pemantapan pembangunan infrastruktur sebelumnya yang ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur yang telah memadai dan lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Pengembangan infrastruktur yang potensial, ditandai oleh: 1) adanya pengembangan infrastruktur transportasi pada wilayah yang pertumbuhannya cukup pesat; 2) meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi terhadap masyarakat dengan memanfaatkan energi alternatif/energi terbarukan; 3) meningkatkan peran media komunikasi dan informasi untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi baik untuk kegiatan pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan informasi lainnya.

Pembangunan bidang penataan ruang diarahkan dalam rangka terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan capaian perwujudan kelestarian lingkungan hidup dan terciptanya keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui partisipasi *stakeholders* dan penegakan aturan.

Pada tahap ini, diharapkan Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berkembang menjadi daerah yang maju dengan tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi, dan pada tahun 2025 yang merupakan tahun terakhir RPJPD dan RPJMD ke-4 Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai masa penyelesaian atas perencanaan pembangunan sebelumnya, evaluasi berdasarkan pelaksanaan pencapaian perencanaan tahun sebelumnya sebagai masa persiapan keberlanjutan RPJMD dan RPJPD tahap berikutnya.

BAB 6

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan berlaku tahun 2005–2025 sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, pada dasarnya merupakan pedoman bagi seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005–2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah, terutama RPJMD. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bupati Bengkulu Selatan berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintah kabupaten, dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh instansi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*), untuk dapat memahaminya secara mendalam dan dapat menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.
2. DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan berkewajiban menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam penjabarannya pada RPJMD maupun dokumen perencanaan lainnya. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen perencanaan selanjutnya, terutama kaitannya dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyusun RPJP Daerahnya mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Bengkulu, serta melakukan penyerasian dalam RPJMD atau menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD.
4. Tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan, lembaga budaya, komunitas adat, organisasi sosial, kalangan dunia usaha, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, diharapkan ikut bertanggungjawab dalam menjadikan acuan penyusunan program dan kegiatannya serta mengawasi pelaksanaannya sampai dengan tahun 2025 yang akan datang.

5. Pimpinan perguruan tinggi di daerah ini, ikut bertanggungjawab dalam pengawasan pada penjabaran lebih lanjut dalam dokumen perencanaan daerah maupun pelaksanaannya oleh pemerintah daerah serta semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).
6. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005 – 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 merupakan instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan program pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan 5 (lima) tahunan, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang maju dan sejahtera.

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang lebih maju dan lebih sejahtera perlu didukung oleh : (1). komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih dan amanah; (2). konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3). kebijakan yang berpihak pada masyarakat; (4). partisipasi masyarakat, dunia usaha serta para pemangku amanah secara aktif, kreatif dan positif. Selain itu penerapan tiga pilar prinsip *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pelaksanaan berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi pembangunan tersebut harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pemangku amanah.


BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKANE AWALUDDIN